

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teoritis**

##### **2.1.1. Teori Struktur Patriarki**

Kata patriarki mengacu pada sistem budaya yang dimana kehidupan diatur oleh sistem “kebapakan”, dimana patriarki atau patriarkat merujuk pada garis keturunan Bapak. Artinya, hukum keturunan Menurut garis Bapak. Harta, kekuasaan, bahkan nama diwariskan kepada anak laki-laki oleh Bapak.

Menurut Bressler yang dikutip oleh Nanang, patriarki adalah sebuah sistem sosial yang memposisikan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama yang sentral dalam sebuah organisasi sosial. Seorang ayah memiliki kuasa terhadap anak perempuannya, keturunannya, serta harta benda yang dimiliki. Dimana hal tersebut seakan menempatkan perempuan dalam posisi ter subordinat (Nanang Hasan Susanto, 2015). Sistem masyarakat didasarkan pada hubungan hirarki pada jenis kelamin. Dimana, laki-laki ditempatkan sebagai kategori sosial yang mendominasi, sedangkan perempuan ditempatkan sebagai kategori sosial lainnya atau seakan sebagai pendukung, sehingga adanya subordinasi perempuan tersebut bisa dikatakan sebagai bagian dari penindasan.

Pandangan ini sejalan dengan teori struktur patriarki Sylvia Walby, dimana Ia berpendapat bahwa ada enam struktur patriarki yang membatasi perempuan dan mempertahankan dominasi laki-laki, keberadaan struktur ini

membatasi kebebasan dan peluang hidup perempuan dibandingkan dengan laki-laki.

Sylvia Walby juga berpendapat bahwasannya patriarki dibagi menjadi dua yaitu patriarki privat dan patriarki publik, dimana patriarki privat merupakan subordinasi perempuan di ranah domestik, sedangkan patriarki publik merupakan subordinasi perempuan di ranah publik (Walby, 1989). Patriarki privat didasarkan pada produksi rumah tangga, dimana terdapat individu yang mengontrol secara langsung di ranah privat yaitu di dalam rumah. Dalam ranah privat laki-laki dianggap sebagai penindas dan bisa sesukanya memanfaatkan perempuan. Sedangkan patriarki publik merupakan sebuah bentuk dimana perempuan memiliki akses terhadap publik maupun privat. Mereka bisa masuk dalam arena publik, tetapi dalam arena publik tersebut mereka ter subordinasi.

Selain pembagian patriarki privat dan publik, adapun enam struktur patriarki menurut Sylvia Walby dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana dominasi laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat memengaruhi peluang perempuan, khususnya dalam ranah politik (Thompson, 2024). Adapun enam struktur patriarki menurut Sylvia Walby.

#### 1. Pekerjaan Berbayar

Akses perempuan terhadap pekerjaan berbayar yang setara menjadi salah satu indikator kemampuan mereka di ruang publik, termasuk politik. Ketimpangan dalam dunia kerja dapat mencerminkan stereotip gender yang memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kelayakan perempuan sebagai

pemimpin, dimana dalam pekerjaan berbayar perempuan jarang mendapat posisi strategis karena dianggap kurang trampil. Hal tersebut selaras dengan pendapat para ahli teori kapital yang berpendapat bahwa perempuan memiliki kapital lebih sedikit dibanding laki-laki karena posisi mereka dalam keluarga. Pekerjaan perempuan sebagai pengasuh anak, suami dan orang tua menghalangi mereka mendapatkan sebanyak mungkin pengalaman kerja dibandingkan laki-laki. Sehingga untuk dukungan finansial dan logistik bisa lebih mudah diberikan kepada kandidat laki-laki, karena persepsi bahwa mereka lebih memiliki peluang untuk menang dibandingkan dengan kandidat perempuan.

## 2. Produksi Rumah Tangga

Dalam produksi rumah tangga terdapat pembagian kerja berbasis gender yang menempatkan perempuan dalam ranah domestik, sedangkan laki-laki ditempatkan di ranah publik. Dimana perempuan cenderung diperkajkan dalam ranah domestik tanpa upah, hal tersebutb menimbulkan ketergantungan perempuan terhadap laki-laki baik secara finansial, sosial maupun lainnya. Hal tersebut juga menimbulkan beban ganda bagi perempuan, dimana beban ganda ini merupakan beban pekerjaan yang diterima salah satu jenis kelamin lebih banyak dibandingkan jenis kelamin lainnya (Hidayati, 2016). Adanya Peran ganda perempuan mencakup tanggung jawab di keluarga sebagai istri, ibu, dan pengasuh, serta di masyarakat sebagai pekerja dan warga negara, dengan pelaksanaan yang seimbang. Sehingga dapat timbul anggapan bahwa perempuan lebih cocok

untuk menjalankan peran domestik, seperti mengurus anak, memasak dan mengurus rumah tangga dibandingkan dengan peran publik, dimana hal tersebut bisa memengaruhi cara pemilih memandang Nurhayati, menciptakan stereotip bahwa ia tidak cukup fokus atau cocok untuk memimpin.

### 3. Budaya

Budaya dalam teori struktur patriarki Sylvia Walby disini menggambarkan bagaimana budaya secara tradisional menciptakan representasi perempuan dari pandangan patriarki dalam berbagai arena, seperti agama dan media. Hal ini mencakup pandangan tradisional yang menempatkan laki-laki sebagai dominan dan perempuan sebagai subordinat, baik dalam ranah domestik maupun publik. Budaya patriarki juga dapat dipengaruhi oleh interpretasi agama, tradisi, media dan stereotip gender yang memperkuat peran tradisional perempuan dan laki-laki. Dalam konteks penelitian tentang resistensi struktur patriarki terhadap kekalahan Nurhayati pada Pilkada Kota Tasikmalaya 2024, budaya patriarki ini memainkan peran penting dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan. Dalam kondisi seperti pada Nurhayati, stereotip ini dapat memengaruhi pandangan pemilih, menimbulkan persepsi bahwa seorang perempuan dianggap kurang sesuai untuk posisi kepala daerah.

### 4. Seksualitas

Seksualitas adalah sesuatu yang bersifat nampak atau terlihat karena seksualitas merujuk pada aspek biologis dan fisik seseorang, yang biasanya mencakup karakteristik fisik yang tampak secara biologis, orientasi seksual,

dan ekspresi seksual. Seksualitas sering dianggap lebih "nampak" karena berhubungan dengan ciri-ciri biologis dan perilaku seksual yang bisa dilihat atau diidentifikasi secara fisik, berbeda dengan gender yang bisa jadi tidak nampak dan sifatnya dibentuk atau dikonstruksi oleh sosial.

Adanya hubungan patriarki dan seksualitas yang didominasi oleh laki-laki, menunjukkan bahwa laki-laki sering kali mengobjekkan perempuan secara seksual, menjadikan mereka hanya sebagai objek seksual. Dominasi seksual ini tidak hanya terbatas pada relasi pribadi tetapi juga merambah ke berbagai area, termasuk tempat kerja dan ruang publik. Hal tersebut Diskriminasi berbasis gender, termasuk adanya stereotip negatif terhadap perempuan dalam kepemimpinan, menjadi salah satu tantangan besar. Dominasi budaya patriarki sering kali menciptakan pandangan bahwa perempuan, terutama yang terlibat dalam politik, lebih rentan terhadap stereotip dan penghakiman berbasis gender, termasuk aspek-aspek yang merendahkan kredibilitas mereka sebagai pemimpin. Misalnya, perempuan politikus seperti Nurhayati mungkin harus menghadapi bias gender yang memperlakukan penampilan, perilaku, atau peran domestiknya secara tidak adil, dibandingkan dengan kandidat laki-laki.

## 5. Kekerasan

Kekerasan laki-laki muncul dalam berbagai bentuk, seperti pemerkosaan, kekerasan terhadap istri, pelecehan seksual, termasuk cat calling. Kekerasan ini tidak hanya dalam ranah privat tetapi juga dalam ranah publik, termasuk kekerasan terhadap perempuan dalam politik, baik secara simbolik maupun

verbal, dapat melemahkan posisi mereka. Bisa saja dalam kampanye politik, serangan seksis atau komentar merendahkan sering kali digunakan untuk menjatuhkan kandidat perempuan.

## 6. Negara

Meskipun negara sudah melakukan perubahan yang memfasilitasi perempuan untuk bisa masuk dalam ranah publik, tidak terlalu banyak kemajuan posisi perempuan didalamnya, meskipun undang-undang diberlakukan namun dampaknya tidak terlalu signifikan. Dukungan institusional terhadap perempuan dalam politik, seperti kebijakan afirmasi atau dukungan partai, sering kali belum memadai. Sehingga kurangnya dukungan struktural dari partai politik atau regulasi yang mendukung keterwakilan perempuan dapat menjadi hambatan bagi kandidat perempuan untuk memenangkan pemilihan.

Penerapan teori Walby ini dapat memberikan analisis untuk memahami berbagai bentuk resistensi struktur patriarki yang dihadapi Nurhayati dalam kekalahannya pada Pilkada Kota Tasikmalaya 2024, serta menunjukkan bagaimana patriarki memengaruhi peluang perempuan dalam politik lokal.

### **2.1.2. Konsep Gender**

Pengertian gender didefinisikan berbeda beda menurut para ahli, seperti menurut Hillary, secara terminologis “gender” didefinisikan sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan, sedangkan secara etimologis kata “gender” berasal dari bahasa Inggris yang memiliki arti “jenis kelamin”(Marzuki, 2007). Sedangkan pengertian gender menurut Muhtar

(2002) yang dikutip oleh Mayssara, bahwa gender merupakan jenis kelamin sosial dalam masyarakat untuk menentukan bagaimana jenis kelamin tersebut dalam masyarakat sosial (Mayssara A. Abo Hassanin Supervised, 2014).

Namun, penelitian ini memakai konsep gender menurut Judith Butler (1990) dalam bukunya *Gender Trouble*, dimana menurut Judith Butler gender bukanlah atribut tetap atau identitas yang bersifat esensial, melainkan sesuatu yang dilakukan atau ditampilkan melalui serangkaian tindakan yang berulang (Butler, 1990). Identitas gender terbentuk dari kebiasaan dan tindakan yang dilakukan berulang kali, sehingga tampak seperti sesuatu yang alami dan tetap. Artinya, seseorang dianggap sebagai laki-laki atau perempuan bukan hanya karena faktor biologis, tetapi karena mereka mengikuti aturan dan norma sosial yang sudah ada. Gender sebenarnya bukan sesuatu yang tetap, melainkan hasil dari pengaruh sosial yang terus dibentuk melalui perilaku sehari-hari.

Judith Butler menjelaskan bahwa seseorang bisa mengalami ketidaksesuaian antara identitas gendernya dan bagaimana masyarakat memandang mereka berperilaku. Jika cara seseorang menampilkan gendernya berbeda dari norma yang berlaku di masyarakat, akan timbul penolakan, diskriminasi, atau stigma.

Selain itu, Butler juga mengaitkan konsep gender dengan kekuasaan dan aturan sosial. Norma-norma gender dipertahankan oleh berbagai mekanisme, baik secara sosial maupun institusional, yang mengatur bagaimana seseorang seharusnya berperilaku. Jika seseorang melanggar

aturan ini, mereka bisa dikenakan sanksi sosial. Namun, Butler menekankan bahwa kekuasaan ini tidak bersifat mutlak dan bisa ditentang. Semakin banyak orang yang sadar untuk menolak aturan tersebut, maka norma-norma dapat berubah dan menghasilkan kebebasan gender.

Dari berbagai pengertian gender di atas peneliti menyimpulkan bahwa gender merupakan konstruksi sosial yang diciptakan oleh masyarakat, untuk mengatur bagaimana laki laki dan perempuan bersikap atau berperilaku dalam sosial masyarakat.

Teori performativitas gender yang dikembangkan oleh Judith Butler menjadi relevan dengan penelitian ini karena membantu menjelaskan bagaimana konstruksi sosial tentang gender berperan dalam kekalahan Nurhayati pada Pilkada Kota Tasikmalaya 2024. Butler berpendapat bahwa gender bukanlah sesuatu yang bersifat tetap, melainkan dibentuk melalui tindakan dan ekspektasi sosial yang terus-menerus direproduksi. Dalam konteks politik, peran kepemimpinan sering dikaitkan dengan sifat maskulin yang dianggap lebih sesuai bagi laki-laki. Sementara itu, perempuan seperti Nurhayati sering dihadapkan pada tuntutan sosial yang menempatkan mereka dalam peran domestik, sehingga dipandang kurang layak untuk berada di ruang publik, terutama dalam posisi kepemimpinan.

### **2.1.3. Konsep Resistensi**

Resistensi adalah pola perlawanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok baik secara tersembunyi ataupun terbuka atas ketimpangan yang ada dalam masyarakat. Resistensi didefinisikan dengan berbagai konsep

dalam berbagai latar yang berbeda. Namun demikian menurut James Scott, resistensi didefinisikan sebagai perlawanan yang tidak dinyatakan secara langsung atau perlawanan diam (Elizabeth, 2019). Dimana pesan yang disampaikan berbentuk symbol, sehingga diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai kondisi yang terjadi dalam komunitas yang ter subordinasi. Resistensi juga dapat dikatakan sebagai bentuk strategi sebuah kelompok atau individu minoritas yang mencoba menghindari konfrontasi atau sebuah konflik dengan kelompok yang mendominasi (Deasy, 2018).

Menurut Moya Llyod, penyebab adanya perlawanan dari pihak yang ter subordinasi dikarenakan tidak adanya pihak luar yang mencoba mengupayakan secara politis, sehingga perlawanan diperlukan untuk menggambarkan dan memperjuangkan semua gerakan. Begitupun menurut Prasad, resistensi muncul dikarenakan tidak adanya ruang-ruang aspirasi (Elizabeth, 2019).

Resistensi disini dimaknai sebagai bentuk perlawanan Nurhayati terhadap struktur sosial-politik yang patriarkal, yang selama ini mendominasi arena politik di Kota Tasikmalaya. Mengacu pada pemikiran James Scott, resistensi tidak selalu hadir dalam bentuk perlawanan terbuka atau konfrontatif. Sebaliknya, resistensi bisa berwujud perlawanan diam (silent resistance), simbolik, dan bersifat terselubung.

Dalam pencalonannya, Nurhayati menggunakan simbol politik berupa representasi perempuan dalam posisi kepemimpinan, yang secara tidak langsung menantang asumsi dominan bahwa politik adalah ranah laki-laki.

Langkah ini merupakan bentuk perlawanan simbolik terhadap struktur patriarki, walaupun tidak secara frontal menentang, kehadirannya sendiri sebagai kandidat perempuan telah menjadi bentuk *silent resistance* terhadap norma yang membatasi perempuan.

Selanjutnya, sebagaimana dijelaskan oleh Moya Lloyd, resistensi muncul karena ketidakadaan dukungan politis dari pihak luar terhadap kelompok-kelompok yang ter subordinasi. Dalam konteks ini, meskipun belum terdapat bukti yang secara eksplisit menunjukkan minimnya dukungan politis terhadap perempuan di ranah politik Kota Tasikmalaya, perjuangan Nurhayati dapat dipahami sebagai bentuk resistensi terhadap struktur politik yang masih didominasi laki-laki. Sebelum mencalonkan diri dalam Pilkada, Nurhayati telah lebih dahulu membangun basis sosialnya melalui pendirian LBH SEHATI, sebuah lembaga advokasi yang berfokus pada pemberdayaan perempuan dan anak. Melalui aktivitas-aktivitas tersebut, Nurhayati memperlihatkan upaya menciptakan ruang-ruang alternatif untuk memperkuat suara kelompok ter subordinasi. Pencalonannya dalam Pilkada kemudian menjadi lanjutan dari konsistensi perjuangannya dalam mendorong keterlibatan perempuan di ruang-ruang publik dan politik.

Menurut Prasad, resistensi juga terjadi karena tidak adanya ruang-ruang aspirasi yang memadai. Nurhayati, melalui keikutsertaannya dalam Pilkada, menciptakan ruang baru untuk aspirasi perempuan dalam ranah politik lokal.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Peneliti perlu meninjau penelitian-penelitian sebelumnya untuk mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Hal ini bertujuan untuk memberikan wawasan mengenai gambaran dari penelitian terdahulu yang sudah dilakukan. Selain itu, peneliti menvoba meninjau penelitian-penelitian sebelumnya untuk mengidentifikasi kesenjangan atau gap dalam penelitian sebelumnya. Identifikasi gap tersebut membantu memastikan bahwa penelitian yang dilakukan tidak hanya mengulang studi sebelumnya, tetapi juga memberikan nilai tambah atau perspektif baru dalam bidang yang diteliti. Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian ini:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ariq Abrar Assidqi dengan judul “Hambatan Keterpilihan Perempuan dalam Politik Lokal: Analisis Kegagalan Endang Kusmayaty dalam Pemilihan Walikota Pangkalpinang Tahun 2018”. Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu, kekalahan Endang-Ismiryadi dipengaruhi oleh tiga faktor utama, kurangnya popularitas Endang Kusumawaty di kalangan masyarakat Kota Pangkalpinang, masih kuatnya budaya patriarki di sebagian masyarakat setempat, serta praktik politik uang yang masih marak terjadi di wilayah tersebut. Melihat penelitian yang relevan di atas terdapat perbedaan pada penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini tidak hanya mengeksplorasi hambatan yang dihadapi oleh kandidat perempuan, tetapi juga bagaimana pencalonan Nurhayati dapat dipahami sebagai bentuk resistensi simbolis terhadap dominasi patriarki

dalam politik lokal. Fokus ini memperluas analisis dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang lebih menyoroti faktor-faktor kekalahan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Cut Septya Mauliza dan Faradilla Fadlia tahun 2018 dengan judul “Kebijakan Responsif Gender dan Pilihan Politik Perempuan (Suatu Penelitian Terhadap Kekalahan Illiza Sa’aduddin Djamal dalam PILKADA Kota Banda Aceh Tahun 2017)”. Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu Kebijakan responsif gender yang ada tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat karena kebijakan tersebut bukan berbentuk kebijakan fisik yang dapat dirasakan secara langsung. Selain itu, beberapa kebijakan responsif gender justru dianggap bias gender, sehingga membuat pemilih perempuan bersikap antipati terhadap sosok Illiza Sa’aduddin Djamal. Faktor lain yang turut memengaruhi ketidaktertarikan pemilih perempuan terhadap kebijakan ini adalah kuatnya budaya patriarki dalam kehidupan masyarakat, ditambah dengan adanya kampanye negatif yang berkembang selama masa kampanye Illiza. Meskipun pemerintah mengklaim bahwa kebijakan responsif gender telah berjalan dan partisipasi perempuan dalam pembangunan sudah membaik, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut belum berjalan dengan baik, sehingga masyarakat tidak mengetahui apalagi merasakan dampaknya secara langsung. Melihat penelitian yang relevan diatas terdapat perbedaan pada penelitian yang akan di lakukan. Penelitian sebelumnya membahas kegagalan Illiza Sa’aduddin Djamal dalam Pilkada dengan menyoroti bias gender dalam kebijakan responsif gender, budaya patriarki,

serta pengaruh kampanye negatif. Penelitian tersebut juga menyoroiti implementasi kebijakan responsif gender yang belum efektif sebagai salah satu penyebab ketidakterpilihan Illiza. Sementara itu, penelitian ini akan fokus pada kekalahan Nurhayati dalam Pilkada Kota Tasikmalaya 2024, dengan menitik beratkan pada analisis struktur patriarki berdasarkan teori Sylvia Walby. Selain itu, penelitian ini akan menyoroiti resistensi simbolis Nurhayati terhadap dominasi patriarki dalam konteks budaya lokal yang kental dengan nilai-nilai patriarki dan pesantren, yang membedakannya dari konteks budaya.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Donita Tondang, Amir Kotarumalos dan Muhtar tahun 2023 dengan judul “Politik Dan Perempuan: Kajian Kegagalan Caleg Perempuan PDIP Pada Pemilu Legislatif Kota Ambon Tahun 2019”. Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu, Faktor-faktor seperti rekrutmen dan kaderisasi partai, kepemimpinan perempuan, ketokohan figur, serta basis sosial yang rendah turut memengaruhi hasil pemilihan. Salah satu temuan penting adalah minimnya pemahaman masyarakat tentang kesetaraan gender, yang menjadi hambatan bagi caleg perempuan dalam meraih dukungan. Selain itu, penerapan sistem konversi suara Sainte Lague juga berpengaruh, mengingat suara caleg perempuan lebih kecil dibandingkan caleg laki-laki incumbent yang lebih dikenal. Rendahnya basis sosial dan kurangnya rekam jejak politik perempuan juga menjadi kendala signifikan. Melihat penelitian yang relevan di atas terdapat perbedaan pada penelitian yang akan dilakukan. Melihat penelitian yang

relevan di atas, terdapat perbedaan signifikan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian sebelumnya menyoroti kegagalan caleg perempuan dari PDIP dalam Pemilu 2019 di Kota Ambon yang disebabkan oleh faktor rekrutmen partai, basis sosial rendah, dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang kesetaraan gender. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan berfokus pada resistensi struktur patriarki terhadap kekalahan Nurhayati dalam Pilkada Kota Tasikmalaya 2024. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis struktur patriarki dalam politik lokal, seperti stereotipe gender, dominasi budaya patriarki, serta kurangnya ruang aspirasi perempuan, yang menjadi penghalang utama bagi partisipasi perempuan dalam politik. Hal ini memberikan perspektif yang lebih spesifik pada konteks budaya patriarki dan tantangan politik di tingkat lokal.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Syalfia tahun 2015 dengan judul “Kegagalan Calon Perempuan dalam Pemilukada Kabupaten Merangin Tahun 2013 (Studi Kasus Fauziah, SE”. Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu Pada Pemilukada Kabupaten Merangin 2013, muncul pasangan Fauziah dan Syukur yang diusung oleh tiga partai politik. Namun, mereka gagal memenangkan pemilihan, dan sejumlah faktor menjadi penyebab kegagalan tersebut. Pertama, isu politik gender yang mendiskreditkan perempuan, dengan sebagian masyarakat Merangin yang masih memandang kepemimpinan sebagai domain laki-laki, memperburuk peluang pasangan ini. Kedua, keterlambatan pencalonan menyebabkan pasangan ini hanya memiliki waktu singkat untuk melakukan sosialisasi dan kampanye,

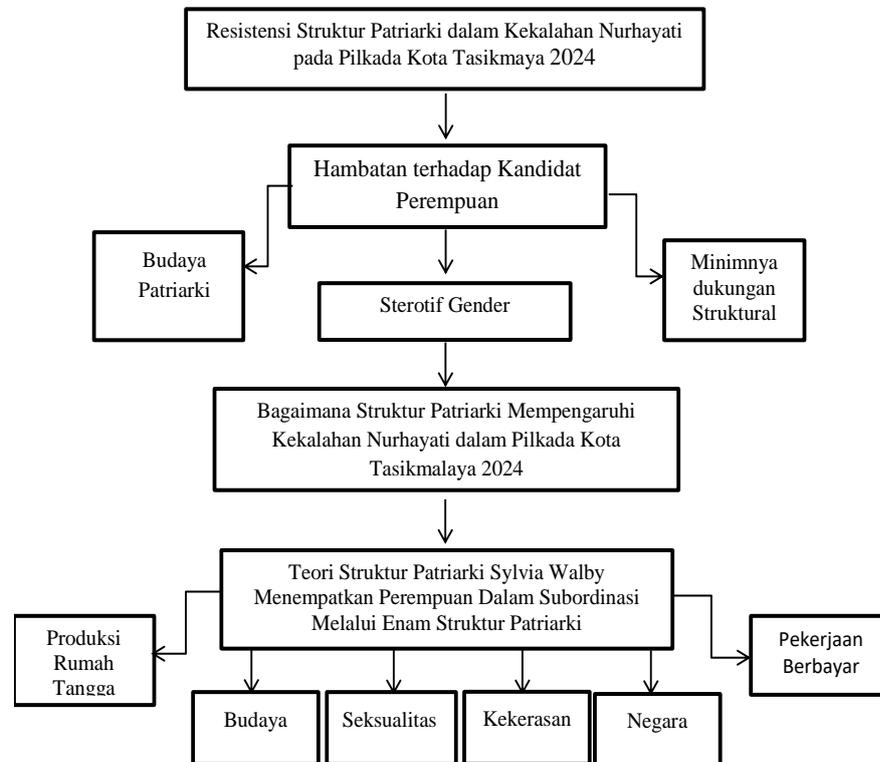
sehingga ketokohan mereka di mata masyarakat kurang dikenal. Ketiga, faktor finansial menjadi hambatan signifikan, karena biaya kampanye yang tinggi mempengaruhi efektivitas mobilisasi pemilih. Keempat, politik primordial juga berperan, dengan banyaknya pemilih dari suku Jawa yang lebih memilih pasangan Haris-Khafid, yang dianggap lebih mewakili mereka. Selain itu, adanya pelanggaran dalam pemilihan yang menyebabkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi menunjukkan adanya ketidakpuasan terhadap proses pemilu. Meskipun demikian, strategi mencalonkan Fauziah sebagai satu-satunya calon perempuan memiliki potensi untuk menarik suara pemilih perempuan, namun isu pemberdayaan perempuan tidak menjadi fokus utama dalam visi-misi mereka, yang berdampak pada rendahnya elektabilitas pasangan tersebut. Melihat penelitian yang relevan di atas, terdapat perbedaan signifikan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini lebih menekankan pada faktor-faktor praktis yang mempengaruhi kegagalan politisi perempuan dalam Pemilukada, seperti politik gender, keterlambatan pencalonan, faktor finansial, politik primordial, serta pelanggaran Pemilu. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan lebih berfokus pada analisis struktural melalui teori patriarki dan gender untuk memahami kendala sistemik yang dihadapi perempuan dalam politik, serta peran kebijakan gender dalam mengatasi ketimpangan tersebut, khususnya dalam konteks kekalahan Nurhayati di Pilkada Kota Tasikmalaya 2024.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Tevana Sari Dewi tahun 2021 dengan judul “Strategi Politik Calon Bupati Perempuan Pada Pilkada Kudus (Kota Santri) Tahun 2018”. Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu, Penelitian ini mengungkapkan bahwa pelaksanaan Pilkada di Kudus tahun 2018 telah berlangsung sesuai dengan tugas dan wewenang dalam tahapan pra-pemilihan. Respon partai politik dan pemilih terhadap keterlibatan calon bupati perempuan menunjukkan penerimaan, dengan pandangan bahwa perempuan memiliki hak yang sama untuk memimpin sebagai bupati. Namun, ketidakberhasilan calon bupati perempuan dalam Pilkada tersebut disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup minimnya sosialisasi terkait kepemimpinan perempuan serta identitas calon yang bukan asli warga Kudus. Sementara itu, faktor eksternal melibatkan praktik politik uang, keberadaan jaringan botoh yang terorganisir, dan persepsi masyarakat Kudus yang masih terpengaruh oleh budaya patriarki.

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu menyoroti secara lebih spesifik peran struktur sosial, budaya, dan politik terhadap peluang perempuan untuk berkompetisi dalam Pilkada di daerah yang serupa, namun dengan pendekatan teori dan konteks yang berbeda.

## 2.3 Kerangka Pemikiran

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran



Maksud dari kerangka pemikiran diatas adalah, adanya hambatan dalam keterlibatan dan kepemimpinan perempuan dalam ranah perpolitikan, contohnya dalam fenomena kekalahan Nurhayati pada Pilkada Kota Tasikmalaya 2024, disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kultural, struktural, dan stereotif gender. Masalah utama yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana resistensi struktur patriarki memengaruhi kekalahan Nurhayati dalam Pilkada Kota Tasikmalaya 2024. Untuk menjawabnya, fenomena tersebut akan dianalisis menggunakan teori struktur patriarki Sylvia Walby, yang menyebutkan ada 6 struktur patriarki yang membatasi perempuan dalam ranah privat dan publik,

diantaranya produksi domestik, pekerjaan, kekerasan, hubungan budaya, relasi negara, dan seksualitas.